BAB II

PERSPERTIF TEORITIS

A. Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowement*), baerasal dari kata *'power'* (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Ife (1995: 61-64) sebagaimana dikutib Edi Suharto pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disii diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkam kekuasaan atau penguasaan klien atas:

a) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.

b) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

c) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tampa tekanan.

d) Lembaga- lembaga: kemampuan menjangkau, mengunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan soaial, pendidikan, kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

f) Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelolah mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa.

g) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.[14]

Agar masyarakat dapat berdaya perlu adanya sentuhan pemberdayaan yang tidak menggurui , apalagi mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dengan kata lain, perlu adanya pendekatan penberdayaan yang bertumpuh pada kekuatan dan potensi

[14] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat*.....hal 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sendiri. Maka mereka akan merasa dilibatkan dalam membangun, merasa berperan dalam menentukan nasibnya sendiri, dan lebih dari itu akan memiliki harapan masa depannya sendiri, dengan apa yang mereka kekendaki.[15]

Pemberdayaan adalah konsep ekonomi yang merangkun nilai-nilai sosial, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan pengembangan berarti membina dan meningkatakan kualitas masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik, lebih kuat etos kerjanya.[16]

Sebagaimana sudah disinggung dalam uraian sebelumnya, unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum menpunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau

---

[15] Hari Witoyo Suparlan, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat*... hal. 4
[16] Ibid...hal. xvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

powerless, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera.[17]

Menurut Moh. Ali Aziz dkk dalam buku dakwah pemberdayaan masyarakat, paradigma aksi metodologi. pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara subtansional merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antar subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengukuran subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi dari individu yang semula objek menjadi subjek. Sehingga relasi sosial yang nanti hanya akan dilarikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjek lain.[18]

Sunyoto Usman sebagaimana yang dikutip oleh Abu Hurairah dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, mengatakan bahwa penberdayaan adalan sebuah proses dan bingkai usulan perkuat apa yang lazim disebut *comunity self –reliance* atau kemandirian.[19] Dalam proses ini masyarakat didampingi atau membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menentukan alternatif solusi

---

[17] Seotomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2011), hal. 88

[18] Moh. Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustak Pesantren, 2005), hal. 169

[19] Abu Huraerah, *Pengorganisasian* ……hal. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah tersebut serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik, kuat dan inovatif. Tentu memiliki keberdayaan tinggi keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.[20]

2. Prinsip Pemberdayaan

Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yaitu:

a) Pemberdayaan adalah proses kaloboratif. Karenanya pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai patner.

b) Proses pemberdayaan menempatkan mayarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan –kesempatan.

---

[20] Rendy R.Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan* (Jakarta: PT Elex Computindo, 2007), hal. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Masyarakat harus memelihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

d) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

e) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menhargai keberagaman yang berasal dari faktor- faktor yang berda pada situasi masalah tersebut.

f) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

g) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

h) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

i) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk mengunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

j) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutuf; permasalahan selalu memiliki baragam solusi.

k) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-stuktur personal dan pembangunan ekonomi secara pararel.[21]

---

[21] Edi Suharto, *membangun* ... hal. 68-69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Strategi Penberdayaan Masyarakat

Menurut Person seperti yang dikutip oleh Edi Suharto menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan.

Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada giliranya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management, crisis intervention.* Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memiliki situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memiliki serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.[22]

B. Dasar-Dasar Pemberdayaan Masyarakat menurut ajaran islam

1. Al-Qur'an

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: *"Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang*

[22] ibid....hal. 66-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui," (QS.Al Anfal -53).

Menurut Qurais Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa ayat diatas berbicara tentang perubahan, yang menggunakan kata *ma/apa* berbicara tentang perubahan apa pun, yakni baik dari *ni'mat* atau sesuatu yang positif menuju ke *niqmat/* murka Ilahi atau sesuatu yang negatif, maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi menyangkut ayat di atas.

Pertama, ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Ini dipahami dari penggunaan kata *qaum/ masyarakat* pada ayat tersebut. Dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Memang, boleh saja perubahan bermula dari seseorang, yang ketika ia melontarkan dan menyebar luaskan ide-idenya, diterima dan menggelinding dalam masyarakat. Di sini ia bermula dari peribadi dan berakhir pada masyarakat.

Kedua, penggunaan kata "*qaum*", juga menunjukkan bahwa hukum ke-masyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin atau satu suku, ras dan agama tertentu, tetapi ia berlaku umum, kapan dan dimana pun mereka berada.

Ketiga, ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku yang pertama adalah Allah swt. Yang mengubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikmat yang di anugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat, sedang pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini masyarakat yang melakukan perubahan pada *sisi dalam mereka atau apa yang terdapat dalam diri mereka.*

Keempat, ayat itu juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah, haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut *sisi dalam mereka.* Tanpa perubahan ini, mustahil akan terjadi perubahan sosial. Karena itu boleh saja terjadi perubahan penguasa atau bahkan sistem, tetapi jika *sisi dalam* masyarakat tidak berubah, maka keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sedia kala.[23]

2. Al-hadits

Pada hakekatnya Agama Islam adalah Agama yang peduli akan pemberdayaan masyarakat yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya pengembangan kesadaran, kemampuan akses sumber daya peningkatan kemandirian dan lingkungannya dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan serta ketentraman masyarakat.

Dalam Hadits juga menjelaskan sebagai berikut

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ " رواه أحمد"

[23] M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 568-569

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Sesungguhnya Allah mencintai kepada hambanya yang berkarya"* (R. Ahmad). [24]

C. Kajian Tentang Lumbung Pangan

1. Pengertian

Lumbung pangan merupakan sejenis bangunan yang digunakan untuk menyimpan bahan pokok. Yang berfungsi untuk mmembantu untuk meningkatkan pembangunan ketahanan pangan masyarakat dalam sekala kecil dan sebagai penggerak ekonomi perdesaan.

Pembangunan ketahanan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan katersediaan,distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahaan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparat pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga cadangan pangan di daerah dalam bentuk lumbung pangan masyarakat dan kelembagaan cadangan pangan lainnya dapat mengantisipasi kondisi darurat (bencana alam dan karawanan pangan) yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan minimal 3 bulan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 mengatakan,bahwa Ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah dan dikembangkan mulai tingkat rumah

---

[24] Ahmad Yani, 160 *Materi Dakwah Pilihan*, (Jakarta: Al-Qalam, 2006). h. 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga. Apabila setiap rumah tangga Indonesia sudah mencapai tahapan ketahanan pangan, maka secara otomatis ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional akan tercapai. Dengan demikian, arah pengembangan ketahanan pangan berawal dari rumah tangga, masyarakat, daerah dan kemandirian nasional.[25]

Proses pemberdayaan tersebut tidak lagi menganut pola serapan, tetapi didesentralisasikan sesuai potensi dan keragaman sumberdaya wilayah. Demikian pula kesempatan berusaha tidak harus selalu pada usahatani padi (karena dengan luas lahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga pada usaha tani non padi perlu dikembangkan. Dalam kaitannya dengan itu, upaya peningkatan ketahanan pangan tidak perlu terfokus pada pengembangan pertanian (dalam arti primer), tetapi diarahkan pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi.[26]

Dapat kita lihat sampai sekarang ini program pemerintah dalam kaitanya dengan pembangunan ketahanan pangan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, pembangunan ketahanan pangan yang ada masih bersifat pada tataran makro saja pemenuhan pangan pada tingkatan unit masyarakat terkecil masih terkesan terabaikan. Untuk mengatasi hal itu semua ada Berbagai upaya

---

[25]http://hardiaputra.wordpress.com/2009/01/15/pemberdayaan-petani-dalam-rangka-pemantapan-ketahanan-pangan-nasional, di akses pada tanggal 08 Desember 2010

[26] http://www.suarapembaruan.com/last/index.htm, di akses pada tanggal 08 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui:

Pertama, pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh dan peneliti. Teknologi yang dikembangkan harus berdasarkan spesifik lokasi yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan. *Kedua*, penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pengadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain. *Ketiga*, Revitalitasasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan lokal dan peningkatan spesifik berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis.[27]

Upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah kegiatan pendampingan dan pengambilan keputusan dalam hal penentuan jenis usaha yang terkait dengan kebutuhan anggota, serta pengembangan perencananan dan pelaksanaan yang partisipatif.

---

[27] http://hardiaputra.wordpress.com/2009/01/15/pemberdayaan-petani-dalam-rangka-pemantapan-ketahanan-pangan-nasional, di akses pada tanggal 08 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini akan berhasil apabila dari sisi manajemen yaitu dana penguatan modal tersalurkan langsung kepada kelompok tani sesuai kriteria, sehingga terjadi akumulasi modal usaha kelompok (tabungan kelompok). Dari sisi teknis, terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani dan pendapatan anggota kelompok tani penerima bantuan. Dan dari sisi perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku anggota kelompok/para petani dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja berkelompok atau secara bersama untuk menumbuhkan kelompok tani yang maju dan mandiri.[28]

D. Teori Pemberdayaan

Terdapat banyak teori pemberdayaan yang menjelaskan masalah pemberdayaan, seperti yang dijelaskan oleh Twelvetress yang dikutip oleh Edi Suharto, bahwa pembangunan masyarakat di bagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan proposional dan pendekatan radikal. Pendekatan propesional merujuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalan rangka relasi-relasi sosial. Sementara itu berpijak pada teori strutural neo-marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidak seimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui

[28] http://www.suarapembaruan.com/last/index.htm, di akses pada tanggal 08 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasanya.[29]

Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah proses perubahan. Perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi dalam level mikro, intermediate maupun makro. Dilihat dari keperluan perubahan dalam rangka pembangunan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, level perubahan yang dibutuhkan tergantung dari pemahaman tentang sumber masalahnya, tentang faktor apa yang diyakini menjadi penyebab rendahnya kondisi kesejahteraan.

Apabila pembangunan masyarakat dianggap sebagai upaya pemecahan masalah, maka bagaimana proses perubahan yang harus dilakukan tergantung dari diagnosis masalahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Eitzen (1987:12) yang dikutip oleh Seotomo membedakan diagnosis untuk menentukan sumber masalah menjadi dua pendekatan *person blame approach* dan *system blame approach.* Apabila mengunakan pendekatan pertama, maka identifikasi sumber masalah terletak pada individu penyandang masalah, dengan demikian pemecahannya dilakukan melalui perbaikan pada level individu terutama yang dianggap sebagai penyandang masalah. Sebaliknya, apabila pendekatan kedua yang digunakan, maka sumber masalah kesejahteraan terletak pada level sistem dan struktur sosialnya. Dengan demikian pemecahannya juga harus menjangkau pada perubahan dan informasi struktural.[30]

---

[29] Edi Suharto, *Membangun*... hal. 40
[30] Seotomo, *Pemberdayaan*....., hal. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teori Modal Sosial

Putnam (1993) yang di kutip oleh Ernan Rustiadi dkk mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran kehidupan sosialyang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara bersama lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Norma dan informasi merupakan dua tipe barang-barang modal dimana sumberdaya modal sosial dapat diinventasikan. Internalisasi norma-norma dapat mengurangi ongkos produksi dengan jalan mengurangi biaya transaksi yang mungkin dihasilkan dari pemantauan dan sanksi-sanksi. Informasi dilain pihak membangun pengetahuan tentang proses-proses yang produktif itu sendiri yang menurunkan ongkos dengan jalan mempertinggi kapasitas produksi. Sedangkan melalui penurunn ongkos produksi, penciptan norma-norma dan penyerapan informsi dapat meningkatkan informasi.[31]

[31] Ernan Rustiadi, dkk *perencanaan dan pengembangan wilayah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 450

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id